

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI MAN 1 BONE

Risnawati Syam, Meisy Niswatunnizal Faisal, Sahrul Setiawan

Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Jln.S. Citarum

e-mail: risnarisnawati934@gmail.com

Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Jln. Pisang baru

e-mail: meisyniswatunnizal@gmail.com

Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Tumba'e

e-mail: sahrulsetiawan894@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di MAN 1 Bone. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: kebijakan kepala sekolah menentukan tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam membuat program-program sehingga membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan yang dibuat oleh pihak sekolah. Mengakui keberadaan masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, rasa kepercayaan, mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan kebebasan dalam memberikan masukan dan saran. Peran masyarakat tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak komite sekolah.

Kata Kunci: 3-5 kebijakan, kepala sekolah, meningkatkan, peran serta masyarakat

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang sentral bagi usaha memajukan bangsa Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang pendidikan, maka taruhannya adalah kerusakan dan kehancuran kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan yang buruk akan berdampak panjang. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang unggul jika kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan.¹

Kepala sekolah sebagai pendidik harus mampu menguasai berbagai macam pendekatan, teknik, metode, dan strategi dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah juga harus menjadi pelopor bagi para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal ini akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. dengan kata lain kunci

¹ Binsar A. Hutabarat, "kebijakan pendidikan di Indonesia: evaluasi terhadap rumusan kebijakan kurikulum bidang pendidikan tinggi", *Societas Dei* Vol. 4, No.2, Oktober 2017, Hal:128

keberhasilan proses kegiatan pembelajaran ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah.²

Peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu pendidikan itu sendiri. Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, adalah pekerjaan di bidang administrasi sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan profesional kependidikan.

Menurut persepsi banyak guru, keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah terutama dilandasi oleh kemampuannya dalam memimpin. Kunci bagi kelancaran kerja kepala sekolah terletak pada stabilitas dan emosi, serta rasa percaya diri. Hal ini merupakan landasan psikologis untuk memperlakukan stafnya secara adil, memberikan keteladanan dalam bersikap, bertingkah laku dan melaksanakan tugas. Dalam konteks ini, kepala sekolah dituntut untuk menampilkan kemampuannya membina kerja sama dengan seluruh personal dalam iklim kerja terbuka yang bersifat kemitraan, serta meningkatkan partisipasi aktif dari orang tua murid.³

Seperti halnya yang diterapkan oleh kepala sekolah MAN 1 Bone tentang kebijakan dalam meningkatkan peran serta masyarakat adalah sekiranya masyarakat telah mengetahui atau masyarakat sudah memberikan suatu kepercayaan. Salah satu buktinya di MAN 1 Bone, selalu menolak siswa yang melebihi target yang ditentukan. Bukti ini menjadi bentuk kepercayaan masyarakat dan mungkin masyarakat telah melihat langsung bukti-bukti, misalnya setiap alumni Man 1 Bone banyak yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi ternama, jurusan-jurusan yang favorit.

Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.

Pada saat dimana suatu program pembangunan didominasi oleh peran pemerintah dan peran masyarakat lemah, maka masyarakat hanya ditempatkan sebagai saluran mempercepat program-program pembangunan ini. Sebaliknya, apabila peran masyarakat kuat dan ditempatkan sebagai subjek, maka akan bermakna sebagai upaya memperdayakan atau penguatan masyarakat, baik secara institusional maupun perseorangan anggota masyarakat.⁴

² Mohammad Juliantoro, "peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan", *Jurnal al-hikmah*, Vol.5 no.2 Oktober 2017, hal: 27

³ Muh. Fitrah, "Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan", *Jurnal penjaminan mutu*, hal: 36

⁴ I Nyoman Temon Astawa, "Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia" *Jurnal penjaminan mutu*, hal: 200

Peran serta masyarakat yang ada di MAN 1 Bone, salah satunya ikut serta dalam memberikan dana, bahan, dan tenaga dalam perawatan serta pembangunan fisik yang ada di MAN 1 Bone, contohnya pembangunan masjid yang ada di MAN 1 Bone.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, adapun yang diwawancarai yaitu kepala sekolah dan bagian humas. Penelitian yang digunakan jenis pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang berlokasi di MAN 1 Bone, kel. Manurunge, kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone. Pada metode kualitatif, teori atau tinjauan pustaka kurang berperan (*minor role*) dalam perumusan masalah. Teori dalam metode kualitatif tidak memberikan arahan utama, karena metode kualitatif sangat mengandalkan masukan, informasi dan cerita dari partisipan. Teori atau tinjauan pustaka hanya berperan sebagai masukan dan dasar awal untuk menunjukkan pentingnya penelitian tersebut dibuat. Teori yang sebenarnya dalam metode kualitatif akan jelas justru pada akhir penelitian, dimana akan ditemukan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang baru.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan kepala sekolah

Kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis", yang artinya kota. Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami baik melalui pendekatan metodologis maupun konseptual. Metodologi pada intinya merupakan keseluruhan proses yang secara sistematis dilakukan untuk melembagakan kebijakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang institusional. Secara konseptual analisis kebijakan merupakan suatu ilmu perekayasa sosial yang artinya adalah ilmu yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik.

Dalam suatu pendidikan, menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal di sekolahnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin seharusnya dalam praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan lima fungsi kepemimpinan didalam kehidupan sekolah.

⁵ Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, hal. 73

Paradigma baru manajemen pendidikan kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai *educator, manajer, administrator, supervisor, dan motivator*.⁶

Peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya mutu pendidikan itu sendiri. Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan dibidang administrasi sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan professional kependidikan.

Kepala sekolah sebagai komunikator bertugas menjadi perantara untuk meneruskan instruksi kepada guru, serta menyalurkan aspirasi personal sekolah kepada instansi, kepada para guru serta menyalurkan aspirasi personel sekolah kepada instansi vertical maupun masyarakat. Pola komunikasi dari sekolah pada umumnya bersifat kekeluargaan dengan memanfaatkan waktu senggang mereka.⁷

Seperti hal yang diterapkan oleh kepala sekolah MAN 1 Bone yang mengatakan bahwa agar guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal ini proses belajar mengajar, tentunya yang diterapkan adalah kode etik seorang guru, jadwal mengajar. Memberikan kontrol kepada guru yang bersangkutan dalam bentuk pemberian jurnal yang mana ketika guru telah mengajar terdapat tanda tangan guru tersebut pada jurnal, jurnal tersebut diedar kalau guru tersebut tidak tanda tangan bisa dikatakan kalau guru tersebut tidak melaksanakan tugasnya. Dimana kepala sekolah setiap hari memeriksa jurnal tersebut, sehingga lebih mudah untuk mengontrol apakah guru tersebut melaksanakan tugas atau tidak.

Sebenarnya guru-guru yang ada di MAN 1 Bone telah mengetahui tugasnya, tinggal diberikan motivasi, apresiasi, memberikan *reward* atau pujian kepada guru yang melaksanakan tugas, sehingga memiliki rasa semangat yang dikarenakan adanya perhatian timbul dari adanya *reward*. Kembali lagi dikarenakan jurnal, guru tidak bisa berbuat apa-apa serta tidak bisa membuat alasan-alasan berdasarkan bukti dari jurnal, yang dimana artinya kepala sekolah telah mengunci. Guru tidak bisa tidak melaksanakan tugas tanpa sepengetahuan, biasanya tidak adanya jurnal tersebut guru-guru merasa kalau tidak mengajar tidak apa-apa karena tidak adanya jurnal sebagai bukti, dengan adanya jurnal disitu tercantum sebagai bukti bahwa guru melaksanakan tugasnya.

Khususnya masyarakat yang ada di sekitar sekolah MAN 1 Bone telah mengetahui atau telah memberikan kepercayaan salah satu buktinya yaitu di MAN 1 Bone menolak siswa yang melebihi target yang ditentukan, bukti ini menjadi bentuk kepercayaan masyarakat dan mungkin masyarakat telah melihat langsung bukti-bukti tersebut misalnya karena setiap alumni MAN 1

⁶ Murni Yanto & Irwan Fathurrochman, "Manajemen kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan" *jurnal konseling dan pendidikan*, Vol. 7, No. 3, 2019. Hal: 128

⁷ Muh. Fitrah, "Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan", *Jurnal penjaminan mutu*, hal: 36

Bone banyak yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi ternama, jurusan-jurusan yang favorit.

Sebagai kepala sekolah tentu ada pengawasan khusus yang dilakukan karena tugas kepala sekolah adalah mengsupervisi, ada namanya supervisi managerial, supervisi pendidikan, jadi setiap guru di supervisi, “perangkat apa yang anda miliki dalam mengajar” dikarenakan memang tugas kepala sekolah yaitu memeriksa.

Pemberian motivasi kepada guru itu terdapat pada pemberian *reward*, memberikan pujian apabila ada guru-guru yang baru atau merasa belum nyaman, kepala sekolah memberikan perhatian termasuk semua warga sekolah, salah satu contohnya yang biasa dilakukan adalah setiap guru diberikan sapaan agar memiliki rasa kedekatan, dan ketika guru memiliki rasa kedekatan maka guru akan memiliki motivasi untuk melaksanakan tugasnya dan tidak mau memperlihatkan hal-hal yang menyalahi aturan.

B. Peran serta masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.

Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peran serta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi. Peran serta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat (anggota masyarakat) terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan untuk dirinya atau kelompoknya. Oleh karena itu, tidak akan diterima jika satu golongan mendikte keinginan dan kepentingannya dalam isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan, apakah itu golongan di dalam negeri, seperti pejabat pemerintah atau usahawan, dan eksternal seperti kekuatan besar misalnya (keuangan) internasional.

Tanggung jawab pengembangan pendidikan sebagai proses sosialisasi adalah berada pada orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Tanggung jawab tersebut tidak pernah lepas tetapi pernah mengendor, sejalan dengan dominannya paradigma pembangunan sentralistik. Oleh karena paradigma tersebut telah bergeser menuju kepada peluang yang lebar bagi teraktualisasikannya kembali partisipasi masyarakat, maka perlu segera dilakukan upaya pemulihan

dan pengembalian tanggung jawab masyarakat terhadap pengembangan pendidikan baik dalam skala mikro maupun skala makro.⁸

Dalam pandangan masyarakat umum sering dijumpai bahwa mutu sekolah dapat ditinjau dari ukuran gedung yang mewah. Adapula masyarakat yang berpendapat bahwa kualitas sekolah dapat dilihat dari jumlah lulusan sekolah tersebut yang diterima di jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk memahami kualitas pendidikan formal di sekolah, perlu kiranya melihat pendidikan formal di sekolah sebagai suatu sistem. Selanjutnya mutu sistem tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan hasil.⁹

Adapun partisipasi masyarakat dalam perawatan serta pembangunan fisik yang ada di MAN 1 Bone antara lain:

1. Dari segi dana, dana masyarakat yang masuk itu dari alumni namun dan tersebut tidak dikelola oleh pihak sekolah melainkan dikelola oleh alumni-alumni itu sendiri dan dimasukkan ke sekolah. Contohnya yaitu mushollah/mesjid yang diperoleh dari bantuan alumni.
2. Bantuan yang lain dari segi anggaran khusus, contohnya bangunan besar yang ada di MAN 1 Bone dimana terdapat anggaran dari pusat.



Gambar 1. Mesjid yang diperoleh dari bantuan alumni MAN 1 Bone.



Gambar 2. Ruang kelas yang diperoleh dari anggaran Pemerintah pusat.

⁸ I Nyoman Temon Astawa, “ Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia”, *Jurnal penjaminan mutu*”, Vol, 3 No, 2 Agustus 2017, hal: 201

⁹ Muh. Fitrah, “Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan”, *Jurnal penjaminan mutu*, hal: 36

Sebelum penetapan keputusan atau kebijakan masyarakat khususnya perwakilan orang tua dipanggil untuk rapat (rapat komite). Disitulah diketahui bagaimana hasilnya, contohnya penerimaan siswa baru dalam hal pakaian atau keperluan siswa lainnya yang dimana dalam hal ini diwakili oleh ketua komite sebagai perwakilan dari sarana dan prasarana.

Pihak sekolah memberikan layanan konsultasi bagi orang tua yang ingin melakukan konsultasi. Hal tersebut terdapat pada program BK (Bimbingan Konseling) dimana misalkan siswa mengalami kesulitan belajar maupun ada permasalahannya di sekolah itu dikonsultasikan ke bimbingan konseling.

Kegiatan yang ada hubungannya diluar sekolah, terkadang orang tua dipanggil untuk rapat namun hanya perwakilan termasuk perwakilan sekolah atau perwakilan kelas yang intinya tidak semua dipanggil dalam pengadaaan kegiatan

Masyarakat diikut sertakan cuman saat ini terkendala oleh permasalahan covid-19. Sebelum masuk sekolah atau penerimaan siswa, orang tua siswa dipanggil untuk diadakan rapat dan berhubung sekarang dibatasi, orang tua siswa tidak dipanggil semua melainkan hanya perwakilan intinya tetaplh hasil rapat yang dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan yang akan diuraikan pada kesimpulan dan saran bagi pelaksana pendidikan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat di MAN 1 Bone, setelah ditemukan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Dimana kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang ada disekolahnya. Salah satu tugas kepala sekolah yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah tentang perkembangan yang terjadi disekolahnya.

Selanjutnya yaitu tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan ikut berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan, salah satu contohnya dengan memberikan bantuan berupa dana, bahan dan tenaga dalam perawatan serta pembangunan fisik sekolah.

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan kepala sekolah harus lebih ditingkatkan agar dalam meningkatkan peran serta masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik lagi. *Kedua*, Koordinator wilayah MAN/SMA di kecamatan Tanete Riattang , agar dapat menghimbau tiap-tiap sekolah untuk membuat program yang lebih banyak melibatkan partisipasi warga masyarakat hingga tercapainya tingkat *partnership*. *Ketiga*, kepala sekolah MAN 1 Bone bahkan sekolah-sekolah yang lain, agar dapat menggalih macam-macam bentuk bentuk partisipasi yang lain seperti bantuan dana, bahan, jasa dan penyusunan program untuk membentuk sebuah perkumpulan orang tua murid agar partisipasi

masyarakat mencapai tingkat *partnership*. Keempat, masyarakat dapat meningkatkan partisipasi secara aktif dalam bentuk bantuan materi, jasa, ide dan moral yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Hutabarat, Binsar A., “kebijakan pendidikan di Indonesia: evaluasi terhadap rumusan kebijakan kurikulum bidang pendidikan tinggi”, *Societas Dei* Vol. 4, No.2, Oktober 2017

Juliantoro, Mohammad, “peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan”, *Jurnal al-hikmah*, Vol.5 no.2 Oktober 2017

Muh. Fitrah, “Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan”, *Jurnal penjaminan mutu*

Semiawan, Conny R., *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*

Temon Astawa, I Nyoman, “Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia” *Jurnal penjaminan mutu*

Yanto, Murni & Fathurrochman, Irwan, “Manajemen kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan” *jurnal konseling dan pendidikan*, Vol. 7, No. 3, 2019